

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI  
AKIBAT PERGAULAN MEDIA SOSIAL DI KUA  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ferdina Widya Puspita**

**NIM. C91214105**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ferdina Widya Puspita  
NIM : C91214105  
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap pernikahan dini akibat  
pergaulan media sosial di KUA Kecamatan  
Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2018

Saya yang menyatakan,



Ferdina Widya Puspita

NIM. C91214105

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini ditulis oleh Ferdina Widya Puspita NIM. C91214105 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
**NIP. 195904041988031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferdina Widya Puspita, NIM: C91214105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

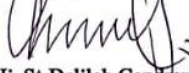
### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



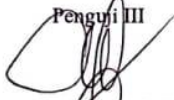
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji II



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji III



H. M. Ghufon, Lc, MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 03 Desember 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Negeri Sunan Ampel  
Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FERDINA WIDYA PUSPITA  
NIM : C91214105  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : ferrbery@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN MEDIA  
SOSIAL DI KUA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2019

Penulis

Ferdina Widya Puspita  
C91214105

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk? dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola deduktif, dengan analisis yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan sebagaimana pernikahan dini pada umumnya, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah adanya izin dispensasi dari Pengadilan Agama; *Kedua*, Pernikahan dini akibat pergaulan media sosial tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta persyaratan administrasi yang tertuang dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, juga telah menjamin hak anak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: *pertama*, bagi Kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seharusnya melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dalam memperkenalkan batas usia minimal dalam pernikahan dan melakukan program bimbingan mengenai pernikahan, khususnya pernikahan dini serta dampak-dampaknya; *kedua*, bagi orang tua seharusnya mendampingi anak-anak dan mengawasi mereka setiap saat ketika belajar, bermain *handphone* maupun yang lain karena sejatinya anak itu membutuhkan perhatian yang sangat besar.

## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>SAMPUL DALAM.....</b>		<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>		<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>		<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>		<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>		<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>		<b>x</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
	C. Rumusan Masalah .....	7
	D. Kajian Pustaka .....	7
	E. Tujuan Penelitian .....	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
	G. Definisi Operasional .....	11
	H. Metode Penelitian .....	12
	I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>19</b>
	A. Pernikahan.....	19
	1. Pengertian pernikahan.....	19
	2. Dasar hukum pernikahan .....	22
	3. Syarat dan rukun pernikahan.....	24
	4. Tujuan dan hikmah pernikahan.....	27
	B. Pernikahan dini .....	30

1. Pengertian pernikahan dini .....	30
2. Dampak pernikahan dini .....	33
<b>BAB III      DESKRIPSI KUA DAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk .....	36
1. Profil KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk .....	36
2. Kondisi geografis .....	37
3. Struktur organisasi .....	38
4. Visi misi KUA Kecamatan Sukomoro .....	39
5. Tugas pokok dan fungsi .....	40
B. Pernikahan dini di Kecamatan Sukomoro .....	41
1. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk terhadap pernikahan dini .....	41
2. Hubungan pernikahan dini dengan pergaulan media sosial Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk .....	46
<b>BAB IV      ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN MEDIA SOSIAL DI KUA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk .....	52
B. Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Sukomoro Nganjuk .....	56
<b>BAB V      PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, yang bertujuan untuk menjadikan keluarga bahagia. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawadah warahmah).<sup>1</sup>Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukkan hati di dalamnya.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

<sup>2</sup>Mustafa Mansyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Annisa ayat 1 yang berbunyi:

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kau saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>3</sup>

Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam satu ikatan berupa pernikahan.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2002), 77.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>5</sup>

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah Swt. yang terdapat di dalam surah Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 406.

ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun, hal ini tentu menjadi satu permasalahan ditengah masyarakat. Jika kurang dari usia yang telah ditetapkan tentu sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut mempunyai peluang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan<sup>7</sup>, beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.

Di Kecamatan Sukomoro pernikahan dini karena pergaulan media sosial hampir 50% dan hamil luar nikah 24% dari siswa-siswi SMP yang berawal dari perkenalan di media sosial dengan menggunakan facebook, instagram, line dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Mereka terpengaruh dengan *handphone* yang akhirnya digunakan untuk mencari jodoh. Dari sini mereka menemukan sebuah tambatan hati yang akhirnya terjadi sebuah perzinaan.

<sup>7</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, t.t.), 85.

<sup>8</sup> Dokumen KUA, Laporan Faktor Pernikahan Dini.

Terlebih bagi laki-laki, tidak hanya mental yang benar-benar harus dipersiapkan, fisikpun harus menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang dalam menghadapi perkawinan. Artinya laki-laki harus siap dibanding wanita, karena laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan menjadi pelindung keluarga dari segala macam ancaman.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Kecamatan Sukomoro sebagai daerah yang cukup banyak ditemui ditengah masyarakatnya dengan fenomena “pernikahan dini” berdasarkan catatan yang terdapat di KUA

[illegible]

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih sempurna dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi hanya berkaitan

[illegible]

Dari masalah-masalah yang telah dibatasi di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

Apresiasi masyarakat muslim dalam mengkaji wacana mengenai pernikahan dini telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Dari penelusuran yang dilakukan bahwa wacana yang memperbincangkan tentang pernikahan dini cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur-literatur yang berbicara seputar hukum. Namun kajian tentang pandangan kepala KUA



- <sup>11</sup>Ahmad Hamim Thohari, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).





dini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Desa Labuhan dan hal ini juga dijadikan sebagai solusi hukum (solution of law) untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga kehormatan masyarakat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan juga untuk menghindari fitnah.<sup>14</sup>

Berdasarkan judul penelitian yang telah diangkat yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” maka dapat diberikan suatu definisi yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan. Sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

- [illegible]

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari masyarakat, sebagai penelitian yang bersifat penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci terhadap pertimbangan dan Hubungan pernikahan dini di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan pergaulan di media sosial.

[illegible]

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,<sup>16</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pertimbangan dan Hubungan pernikahan dini di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan pergaulan di media sosial.

## 2. Sumber data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala sosial, karena masyarakat sebagai subjek. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel. Berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber primer yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi narasumber yakni informasi dari Kepala KUA di Kecamatan Sukomoro.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen apa saja yang berhubungan dengan:

- 1) Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.

<sup>16</sup>Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), 105.

- 2) Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*.
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 5) Staf KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan studi dokumen, sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur dari angket atau wawancara namun juga dapat digunakan untuk merekam dari berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.

Dapat diartikan juga sebagai suatu pengaman dan pencatatan secara sistematis terhadap unsure-unsur yang tampak dalam suatu permasalahan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.



Pengolahan data kualitatif dalam penelitian akan melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>18</sup>

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>19</sup>

c. Menarik kesimpulan

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, dalam penelitian sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2007), 134.

<sup>19</sup>Ibid., 137.





rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memberikan konsep mengenai pernikahan dan pernikahan dini dalam perundang-undangan.

Bab ketiga, memberikan gambaran mengenai keadaan KUA Kecamatan Sukomoro dan pernikahan dini di KUA Sukomoro.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap perkara pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok masalah dan saran-saran.

## KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

## 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah.<sup>1</sup> Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.



Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholeh. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>6</sup>

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

[illegible]





<sup>16</sup>Pasal 2 Undang undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.





- 7) Tidak sedang mempunyai isteri empat (Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)<sup>19</sup>
- b. Calon Istri, syarat-syarat:
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
  - 6) Tidak dipaksa (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
  - 7) Tidak dalam ihram haji atau umrah<sup>20</sup>
- c. Wali Nikah, syarat-syarat:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi Nikah, syarat-syarat:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 50.

<sup>20</sup>Ibid., 55.

- 5) Baligh
  - 6) Berakal <sup>21</sup>
- e. Ijab Qabul, syarat-syarat:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah
  - 4) Anatar ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.<sup>22</sup> Ada beberapa hikmah dan tujuan pernikahan dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut:

<sup>21</sup>Sudarsosno, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 604.

<sup>22</sup>Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah dalam melanjutkan generasi yang akan datang

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorong dalam mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.<sup>23</sup> Anak-anak merupakan tujuan asal yang disandarkan dalam pernikahan. Maksudnya yaitu untuk melanjutkan keturunan sekiranya dunia ini tidak sepi dari jenis-jenis manusia.

- b. Menjaga diri dari syetan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu memperbanyak anak dengan melanjutkan keturunan.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.

<sup>24</sup> Ali Yusuf As-Subkhii, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*...., 25-27.

- c. Untuk mendapat keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan.<sup>25</sup> Karena pernikahan adalah akad yang sah yang di ridhoi oleh Allah dan sebaik-baik manusia adalah yang dapat menjaga dirinya dengan pernikahan, sebagai suami istri harus bisa menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.

- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah adalah sebagai sesuatu yang di perintahkan.

Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*..... 47.

<sup>26</sup>Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*..., 25-27.

## B. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian pernikahan dini

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 Tahun, sedangkan yang belum berumur 21 Tahun haruslah mendapat izin dari orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Bagi mereka yang belum berumur 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak belum mencapai umur 21 Tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah menikah”. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia ditetapkan oleh karena berdasarkan

pertimbangan kematangan kepentingan usaha sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan telah dilakukan bermacam upaya yang salah satunya adalah mengenai batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 batas usia untuk melangsungkan pernikahan 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita. Hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada realitanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini bisa saja terjadi karena kekurangsiapan mental, sosial, ekonomi pasangan suami isteri.

<sup>27</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan usia di bawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya adalah sudah umur atau sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *mukim*.

Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan *mukim* sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (minum) maka dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam

juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan yang telah mencapai umur dewasa, yaitu di bawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya adalah apakah sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *muhsan*.

Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan sudah dewasa, sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (minum) maka dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam

juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan yang telah mencapai umur dewasa, yaitu di bawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya adalah apakah sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *muhsan*.

Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan sudah dewasa, sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (minum) maka dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam

juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan yang telah mencapai umur dewasa, yaitu di bawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya adalah apakah sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *muhsan*.

Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan sudah dewasa, sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (minum) maka dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam

- juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.
- Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan perempuan yang telah mencapai umur dewasa, yaitu di bawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya adalah apakah sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *muhsan*.
- Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan sudah dewasa, sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (minum) maka dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam



- b. Telah keluar mani
- c. Telah haid bagi anak perempuan<sup>28</sup>

Para ulama madzhab sepakat<sup>29</sup> bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.

## 2. Dampak Pernikahan Dini

Setelah adanya faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, pasti ada dampak terhadap pernikahan dini tersebut, dari segi positif maupun negatif.

a. Dampak positif:

- 1) Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga di bantu.
- 2) Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo dikalangan remaja, dengan menikahkan anaknya orangtua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah dikalangan remaja tidak akan terjadi.
- 3) Dapat belajar memikul tanggung jawab diusia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya

<sup>28</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.32 (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 2000), 316-317.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., 166.

b. Dampak negatif:

Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu? Ketidaktahuan ini disebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat di hindari.

Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih dibawah umur, mereka masih mempunyai sifat kenakak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini masih ikut dengan orang tua, masih tinggal dengan orang tuanya sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Hal inilah

yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

3) Dampak terhadap anak-anaknya

Tidak mudah untuk menjalankan pernikahan diusia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 Tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian di dalam pernikahan dini. Karena sering kali pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, sehingga kemudian anak itu dititipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada neneknya dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya.













Dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Selain melaksanakan fungsinya, KUA juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

## B. Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

## 1. Pertimbangan Kepala KUA Terhadap Pernikahan Dini

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang, baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan

<sup>5</sup>Pasal 2 dan 3 PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Utusan Agama.

dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang. Namun yang ada di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sekarang memang seperti itu, pernikahan dini akibat pergaulan media sosial merupakan pernikahan dini yang konotasinya kurang baik, karena adanya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini itu.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi dibawah usia 16 Tahun. Dan pada umumnya mereka menikah dikisaran usia 13-16 Tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dengan ini mendapatkan data berupa pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa pernikahan dini di sini banyak terjadi karena pergaulan media sosial, yang mana para remaja saling berkenalan melalui *handphone* yang mereka gunakan. Di era globalisasi ini, remaja menggunakan *handphone* bukan untuk sekedar berkomunikasi, tetapi digunakan untuk ajang pencarian jodoh. Yang mana dengan mencari jodoh di media sosial mereka tidak mengetahui pasti pasangan mereka, entah itu sudah kerja ataupun masih sekolah. Ketika berkenalan pastinya berharap akan adanya sebuah pertemuan, dan mereka pastinya sudah

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, pernikahan dini banyak terjadi, ketika mereka menginginkan sebuah pernikahan dengan usia mereka yang belum cukup, dispensasi Pengadilan Agama harus dilakukan untuk mendapatkan izin pernikahan.<sup>7</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan dan pendidikan agama kepada anak-anaknya sebagai generasi masa depan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan dan tindakan yang dapat menghancurkan masa depan generasi ini. Walaupun pernikahan dibawah umur 21 Tahun diperbolehkan Undang-undang Perkawinan dengan izin orang tua, tetapi sebagian besar pernikahan usia dini disebabkan oleh kehamilan luar nikah. Untuk menekankan angka pernikahan dini dan seks bebas pada remaja, pendampingan orag tua menjadi hal paling dominan dalam membentuk karakter remaja putri untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak masa depannya. Selain itu

<sup>7</sup>Ibid.

perlu campur tangan berbagai pihak dan kerja sama kita lakukan dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi kepada remaja putri mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya hamil luar nikah.<sup>8</sup>

Dasar Hukum yang digunakan oleh Kepala KUA dalam  
mengizinkan pernikahan dini yaitu:

- a. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

- b. Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

- c. Batas usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”<sup>9</sup>

- d. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Jika ada hal penyimpangan dalam hal itu maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
  - b. Pengumuman kehendak perkawinan;
  - c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
  - d. Penyerahan buku Pencatatan Perkawinan.”<sup>11</sup>

j. Ayat (1) dan (2) Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>12</sup>

## 2. Hubungan pernikahan dini dengan pergaulan media sosial

Rata-rata pernikahan yang baik adalah 25 Tahun untuk wanita dan 27 Tahun untuk pria. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama terhadap wanita itu sendiri. Karena pernikahan dini artinya, menikah disaat usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini dan melahirkan di usia remaja adalah beresiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, seperti dari segi psikis

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>12</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab.<sup>13</sup>

a. Ekonomi

<sup>14</sup> BKKBN, *Pedewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010), 9.



Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.<sup>15</sup>

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah yang menyebabkan orang tua kurang memahami adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor internet, dengan mudahnya akses informasi. Anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya yang masih dini. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya.

[illegible]



e. Hamil luar nikah

Hamil luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena pemerkosaan sehingga terjadilah hamil luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh si gadis.

Hal ini semakin dilematis karena ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

f. Adat

Pernikahan terjadi karena proses perjodohan sejak anak-anak mereka masih kecil. Hal ini disebabkan karena dengan pernikahan anak-anak mereka diharapkan bisa mempererat hubungan kekeluargaan dari mempelai pria maupun wanita. Bahkan hal ini sudah menjadi tradisi bahkan budaya bagi orang yang masih melakukannya.

Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Selain itu dengan adanya globalisasi yang membuat alat-alat elektronik sekarang semakin maju dan canggih membuat anak-anak rentan

terhadap hubungan antar lawan jenis hal itu berakibat timbulnya pergaulan akibat media sosial yang kini semakin merajalela. Hubungan dengan lawan jenis untuk memberi semangat, untuk memberi perhatian, semua berawal dari situ pada akhirnya mereka terjerumus dengan pernikahan dini akibat pergaulan yang mereka jalani.<sup>16</sup>

g. Pergaulan media sosial

Dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya.

Perkembangan yang pesat membuat hubungan dengan orang lain semakin dekat meskipun terpisah ribuan kilometer dan zona waktu yang berbeda. Media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki manfaat dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.

Media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, berkomunikasi kapanpun dan dimanapun tidak masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Semakin berkembangnya teknologi terutama teknologi informasi yang lebih dikenal dengan internet. Banyak muncul

<sup>16</sup> Zahid, *Wawancara*, Nganjuk, 5 Juli 2018.

aplikasi atau situs-situs jejaring sosial dimana dengan adanya hal semacam ini memudahkan seseorang untuk mendapatkan teman-teman baru. Dan tidak jarang dari jejaring sosial seperti ini banyak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Apalagi di aplikasi-aplikasi jejaring sosial tentu bersifat private yang menjadikan seseorang leluasa dalam menyampaikan sesuatu. Namun tidak semua hal dicurahkan dalam media sosial karena komentar-komentar dari teman-teman itulah yang dapat memicu terjadinya hubungan lebih jauh.

Bisa diambil kesimpulan, yakni harus menyeimbangkan antara hubungan di dunia nyata dengan hubungan di media sosial, harus bisa menjadikan media sosial sebagai suatu tambahan berharga bagi pergaulan di dunia nyata, harus memahami mana yang boleh diungkapkan di media sosial dan mana yang tidak.

Pernikahan adalah anjuran Allah Swt. bagi manusia mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu pernikahan itu sendiri dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu untuk melanjutkan dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Kepala KUA Kecamatan Sukomoro dalam menjalankan tugasnya berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang

itu merupakan sumber utama dalam pelaksanaan hukum perka  
Indonesia.

Kepala KUA Kecamatan Sukomoro dalam menjalankan tugasnya harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan-aturan yang lain. Karena hal itu merupakan sumber utama dalam pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia.

## 1. Dampak Positif

a. Menghindari hamil di luar nikah

Nikah muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan adanya pernikahan tersebut untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan oleh para remaja.

b. Menjaga kehormatan nama keluarga

Apabila sudah terjadi kehamilan pastinya nama baik keluarga akan tercoreng, sehingga sebaik mungkin demi menjaga nama baik keluarga pernikahan dini itu dilakukan.

c. Mengurangi beban orang tua

Ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan seseorang. Terkadang orang tua menikahkan anaknya kepada keluarga yang lebih mapan hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari.

d. Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/ dorongan kepada seseorang untuk bertanggungjawab, baik untuk dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

## 2. Dampak Negatif

a. Kehilangan masa remaja

Karena dalam keadaan yang sudah menikah maka untuk menikmati masa-masa liburan bersama teman-teman pastinya sangat sulit, dan apabila sudah memiliki bayi tidak memungkinkan untuk diajak pergi jauh.

b. Pendidikan yang terabaikan

Jika sudah menikah di usia dini pastinya akan mengorbankan pendidikan, dimana usia dini belum sepenuhnya lulus SMA.

c. Kesehatan

Terutama bagi wanita, hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim.

Selain adanya dampak dalam pernikahan dini pastinya ada faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yang telah di jelaskan di BAB sebelumnya. Di Kecamatan Sukomoro pernikahan dini terjadi karena adanya faktor pergaulan di media sosial, hal ini merupakan faktor utama. Karena hal itulah di Kecamatan Sukomoro banyak terjadi pernikahan dini. Banyaknya tingkat pernikahan dini di Kecamatan Sukomoro ini karena kurangnya perhatian dari orang tua. Yang mana orang desa selalu disibukkan dengan pekerjaan tanpa mengetahui bagaimana perkembangan anak-anaknya, sehingga anak lebih senang berkomunikasi dengan lawannya di jejaring sosial dari pada orang tuanya yang setiap hari bertemu namun tidak ada perhatian.

Pernikahan dini itu terjadi berawal dari mereka yang tidak berpapasan, hanya lealui jejaring sosial yang biasa dilakukan adalah bertukar foto, selain itu juga melakukan video call. Setelah itu terjadi mereka merencanakan sebuah pertemuan. Dari pertemuan itu yang lama kelamaan selalu beretemu dimanapun tempatnya, akhirnya terjadilah suatu hubungan yang erat dimana hal itu dapat terjadi perzinahan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Yaqub Suyoso, *Wawancara*, Nganjuk, 5 Juli 2018.

Terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari hal itu adalah kehamilan, yang kemudian solusi bagi keluarga adalah menikahkan mereka.

[illegible]

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dalam akad pernikahan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Adapun rukun-rukun pernikahan sebagai berikut:

- ## **B. Analisis Yuridis terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk**

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.32 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 61.





Remaja seringkali melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu mulai berpegangan tangan, cium kening, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, dan sebagainya. Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya, banyak ditemui pernikahan dini di pedesaan dan kondisi mereka baik-baik saja. Dari hal tersebut orang tua perlu disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi masa depan anaknya.

Di dalam Bab 2 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, berbunyi:

[illegible]

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun”.

Dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun

## 2007 Tentang Pencatatan Nikah:

“Apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 Tahun dan seorang calon isteri belum mencapai usia 16 Tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan”.

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 Tahun dan calon pengantin wanita belum berusia 16 Tahun. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di dalam pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sukomoro  
Kabupaten Nganjuk, telah memenuhi syarat administrasi:

a. Rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sesuai pasal 6 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Selain itu, juga diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

b. Telah adanya dispensasi perkawinan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi Kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, juga dapat meminimalisir kelakuan buruk anak di luar nikah, yaitu:

- Penanaman nilai agama, moral dan pendidikan karakter.
- Orang tua harus menjaga perilaku anak muda.
- Memberikan pengawasan intensif terhadap setiap kegiatan anak muda.



2. Bagi orang tua seharusnya mendampingi anak-anak dan mengawasi mereka setiap saat ketika belajar, bermain *handphone* maupun lain karena sejatinya anak itu membutuhkan perhatian yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Baihaqi, Ahmad Rafii. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- BKKBN. *Pedewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Farisi, Alfian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini Di Desa Labuhan Kecamatan Areseh Kabupaten Sampang". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kauntur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Penanggulangan Pencatatan Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam: Studi Kasus Sambirampak Kidul Kota Anyar Probolinggo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Mansyhur, Mustafa. *Qudwah di jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Nadin. *Wawancara*. Desa Sukomoro, 23 Desember 2018.
- Prihyugiarto dan Irawati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pra Nikah Pada Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN, 2005.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.



- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, 1984.
- Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sudarsosno. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukinem. *Wawancara*. Desa Sukomoro, 23 Desember 2018.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia, 1992.
- Suyoso, Yaqub. *Wawancara*. Nganjuk, 5 Juli 2018.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thohari, Ahmad Hamim. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Utsaiin, Syekh Muhammad Sholeh, dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dwud. *Pernikahan Islam: Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 1998.
- Zahid. *Wawancara*. Nganjuk, 5 Juli 2018.
- Dokumen Profil KUA.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

